

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab ke empat atas hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang murni bersumber dari daerah itu sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekaayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011 sampai dengan 2015 mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun mempunyai arah pengaruh yang negatif.
2. Secara umum dana alokasi umum merupakan pendapatan yang paling besar bagi kabupaten dan kota di Provinsi DIY dalam struktur keuangan daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dana alokasi umum pada kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan 2015 mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang bermanfaat lebih dari satu tahun. Hasil pengujian terhadap belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011

sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa belanja modal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memberikan bukti empiris terkait pengujian sektor keuangan dalam APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data LKPD kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 yang sudah diaudit Badan Pemeriksa keuangan belum terbit sehingga penelitian hanya bisa dilakukan hingga tahun 2015.
2. Data hanya diambil tiga variabel terkait aspek keuangan dalam LKPD yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal.
3. Belum memasukkan faktor penentu pertumbuhan ekonomi di luar aspek keuangan.

5.3 Saran

5.3.1 Untuk Pemerintah

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah, antara lain dapat dilakukan dengan:
 - a. Mengoptimalkan PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB P2).
 - b. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disertai penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan pengawasan yang baik.
 - c. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah.
 - d. Mengoptimalkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Melakukan kebijakan-kebijakan tertentu agar dana alokasi umum dapat diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi daerah, misalnya kebijakan memakai batik daerah pada hari tertentu untuk PNS dengan himbauan membeli pada pedagang lokal.
3. Meningkatkan anggaran belanja modal dengan konsentrasi pada jalan, irigasi, jaringan, pasar, dan prasarana umum yang terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan memaksimalkan realisasi penyerapan anggaran.
4. Melaksanakan program-program yang berorientasi pada rakyat miskin seperti menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, menciptakan lapangan pekerjaan untuk meminimalkan jumlah pengangguran.
5. Meningkatkan investasi sektor swasta dengan promosi daerah dan sosialisasi kemudahan perizinan.

5.3.2 Untuk Peneliti Lain

1. Memperluas variabel penelitian dari sisi keuangan pemerintah untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.
2. Memasukkan faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan ekonomi di luar sektor keuangan.